

## **Profil Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang**

**Septi Ega<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author: Septi Ega (E-mail: [septiega2109@upi.edu](mailto:septiega2109@upi.edu))

**Abstrak:** Dalam sebuah organisasi baik formal maupun non formal dibutuhkan adanya seorang pemimpin. Dalam lembaga pendidikan sosok pemimpinnya yaitu kepala sekolah yang memiliki peran penting dalam menentukan dan mengelola sekolah. Status sekolah memiliki fungsi penting untuk kepemimpinan kepala sekolah yaitu antara sekolah negeri dengan sekolah swasta tentu memiliki perbedaan yang berpengaruh terhadap kebijakan sistem kepemimpinan yang akan dilakukan kepala sekolah. Sekolah negeri sering dianggap memiliki pemimpin yang unggul yang dibuktikan dengan sekolah favorit siswa dan identik dengan aturan yang tegas yang dibuat kepala sekolah untuk memajukan sekolah dan warga sekolah dari berbagai lingkup. Begitu pula dengan sekolah yang umum dengan yang kental dengan agama tentu memiliki sistem kebijakan kepala sekolah yang berbeda dengan sekolah umum. Dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh status sekolah terhadap kebijakan sistem kepemimpinan kepala sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus menggunakan teknik wawancara tidak langsung yaitu menggunakan google form dengan responden sebanyak 30 orang kepala sekolah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari berbagai sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta di Sumedang. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status sekolah memiliki pengaruh terhadap pengambilan sistem kebijakan kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah untuk memajukan kualitas sekolah yang dipimpinnya.

**Kata Kunci:** sistem kebijakan kepala sekolah, sekolah negeri, sekolah swasta

### ***Leadership Profile of Public and Private Elementary School Heads in Sumedang Regency***

**Abstract:** *The In an organization both formal and non-formal, a leader is required. In educational institutions, the leader is the principal who has an important role in determining and managing the school. School status has an important function for the leadership of the principal, namely between public schools and private schools certainly have differences that affect the policy of the leadership system that will be carried out by the principal. Public schools are often considered to have superior leaders as evidenced by students' favorite schools and synonymous with the strict rules that principals make to advance schools and school residents of various scopes. Similarly, public schools use thick with religion certainly have a policy system of principals that are different from public schools. With this, the study aims to look at the influence of school status on the policy of the principal's leadership system. This research uses qualitative methods with case study design using indirect interview techniques that use google form with respondents as many as 30 elementary school*

*principals (SD) and Madrasah Ibtidaiyah (MI) from various schools both public and private in Sumedang. In the results of the study, it can be concluded that the status of the school has an influence on the making of the leader policy system carried out by the principal to advance the quality of the school he leads.*

**Keywords:** *principal policy system, public schools, private schools*

## I. PENDAHULUAN

Dalam suatu organisasi penting adanya seorang pemimpin. Kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi pendidikan bertujuan sebagai penentu dan pengelola untuk menentukan arah kemajuan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana Suryana & Kurniady (2018) mengemukakan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hartini, dkk. (2017) mengatakan bahwa kepala sekolah menjadi aspek penting dalam keberhasilan tujuan yang hendak dicapai. Kekuatannya sebagai pemimpin resmi, perlu didukung dengan kinerjanya dalam melaksanakan peranan, tugas dan wewenangnya. Kepemimpinan kepala sekolah sangat berperan untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan bermutu.

Setiap kepala sekolah memiliki strategi atau cara tersendiri dalam memimpin anggotanya. Sejatinya memimpin bukan hal yang mudah, karena membutuhkan kerja keras yang lebih dalam mengendalikan kesabaran, dalam menggunakan kecerdasan dan dalam mengendalikan emosional. Dimana pada biasanya kita menghadapi masalah atau persoalan yang kecil, namun pada saat menjadi pemimpin masalah besar bahkan masalah yang sangat besar harus dihadapi. Sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki karakteristik mereka sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing akan menampilkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Sejalan dengan penelitian Nurdin & Usman (2013) bahwa status sekolah hanyalah sebagai dasar acuan tetapi peran kepala sekolah yang sangat penting untuk memajukan sekolah. Sama halnya dengan sekolah biasa dengan sekolah berbasis Islam keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki tujuan yang sama seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara dan karakteristik masing-masing, sekolah negeri dan sekolah swasta tentu telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut (MPR, 2019).

Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memiliki berbagai dimensi yang satu sama lain berkaitan dan saling menunjang yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar

mengajar untuk peningkatan kualitas dan pengembangan potensi siswa. Kepala sekolah memiliki jabatan tertinggi di sekolah. Menurut Priansa & Junidan (2014) bahwa kepala sekolah merupakan pejabat profesional yang ada dalam organisasi sekolah, yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya sekolah dan bekerja sama dengan guru-guru, staff dan pegawai lainnya dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah yang profesional ia akan melakukan penyesuaian kebutuhan dunia pendidikan dan mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi. Namun pada realitanya masih banyak yang berpikir dan menganggap bahwa sekolah yang memiliki status sekolah negeri lebih unggul karena kepemimpinan kepala sekolahnya daripada sekolah swasta dalam sistem kepemimpinan kepala sekolah. Padahal pada praktiknya menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin sebuah lembaga pendidikan seperti kepala sekolah tidaklah semata-mata memegang jabatan tertinggi saja, akan tetapi dibebani beberapa tanggung jawab yang luar biasa, sehingga kepala sekolah haruslah cukup akan ilmu baik ilmu kependidikan maupun ilmu kepemimpinan.

Sebelum mengambil kebijakan dalam mengelola sekolah, kepala sekolah dasar bisa memilih teori dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat terlebih dahulu dari beberapa gaya kepemimpinan yang ada sesuai dengan karakter pribadi, dan kondisi organisasi sekolah yang dipimpin. Yang terpenting bagi kepala sekolah dasar, harus bisa menampilkan peranan kepemimpinan yang baik. Berdasarkan teori kepemimpinan dua dimensi, gaya kepemimpinan itu mengacu pada dua sisi, yaitu sisi tugas atau hasil, dan sisi hubungan manusia atau proses (Hamidi, dkk., 2019). Selanjutnya penting juga bagi seorang kepala sekolah untuk mengetahui ilmu dasar kepemimpinan organisasi pendidikan untuk membuat dan mengambil kewenangan terkait kebijakan yang akan dilakukan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dan pengelola sekolah harus memiliki visi dan misi, lalu strategi manajemen pendidikan dan berorientasi kepada mutu. Kewenangan kepala sekolah bukan hanya membuat kebijakan namun dikatakan menurut Nawawi & Hadari (2012) bahwa kepala sekolah juga sebagai manajer pendidikan berfungsi mewujudkan pendayagunaan setiap personal secara tepat, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal untuk memperoleh hasil yang yang maksimal, pada segi kuantitas maupun kualitas dalam proses mengajar belajar di sekolah. Keberhasilan atau kegagalan suatu sekolah dalam menampilkan kinerjanya, banyak bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala sekolahnya.

Sumidjo (2002) mengatakan bahwa kepala sekolah juga adalah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu lembaga atau sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi

antara guru yang memberikan pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. Hal ini yang menjadikan kewenangan kepala sekolah juga harus adanya interaksi antara pemimpin dan orang lain yang dipimpin dalam suatu kelompok atau organisasi. Pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya mempengaruhi dan mengarahkan serta menggerakkan seluruh anggota kelompok untuk memberdayakan sumber daya organisasi yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu erat kaitannya juga dengan peran sebagai manajer, dimana kepala sekolah sebagai manajer berfungsi untuk mengelola dan mengorganisasikan sebuah lembaga dan institusi, sistem sekolah yang terbentuk dalam sebuah struktur organisasi yang masing-masing memiliki koordinator sebagai penanggung jawabnya (Pratiwi & Afriansyah, 2020). Hal ini sering disebut sebagai manajemen kontrol. Sebagai manajer kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan Suhardiman B (2012) bahwa kepemimpinan kepala sekolah juga merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber, dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Peran pemimpin sebagai administrator melaksanakan sistem administrasi dengan sebaik-baiknya telah dilaksanakan, dan dalam hal ini membuat beberapa program dan kebijakan. Pelaksanaannya berdasarkan pembentukan organisasi dan tim-tim yang terlibat. Seperti setiap guru harus membuat RPP yang otentik dan dikumpulkan kepada koordinator kurikulum. Karena kepala sekolah memiliki peranan penting dan segala sesuatu yang ada di sekolah. Untuk itu antara kepala sekolah dan guru harus saling bekerjasama dan diperlukan koordinasi dalam memajukan sekolah berkualitas. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan melihat apakah adanya perbedaan-perbedaan yang mempengaruhi status sekolah terhadap pengambilan dan implementasi kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah yang maju, efektif dan bermutu.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada artikel mendeskripsikan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, cara pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data (Aryanti, 2020). Dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi berupa hasil temuan-temuan secara rinci (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan pada kepala sekolah jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah baik itu yang berstatus sekolah negeri ataupun sekolah swasta di Sumedang. Adapun dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan desain penelitian studi kasus dalam bentuk survei. Dalam penelitian ini survei bertujuan untuk menggali informasi yang

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisisioner ataupun angket dalam bentuk *google form* terkait dengan pengaruh status sekolah terhadap sistem kebijakan yang hendak dilakukan kepala sekolah pada sekolah yang dipimpinnya. Wawancara tidak langsung melalui *google form* dikarenakan untuk mempermudah dalam memperoleh data dari banyaknya kepala sekolah di Sumedang. Banyaknya responden yang berpartisipasi yaitu sebanyak 30 orang kepala sekolah dari berbagai sekolah ditingkat sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) baik itu yang berstatus sekolah negeri ataupun sekolah swasta.

Survei merupakan penelitian dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari banyak nya populasi ataupun yang sampel (Arikunto, 2012). Pencarian data melalui penyebaran angket penelitian ini dimulai sejak bulan Desember melalui *platform* di media sosial. Adapun instrument penelitian tersebut memuat beberapa kelompok pertanyaan yaitu mengenai: 1) Sistem kebijakan dan kewenangan kepala sekolah. 2) Sekolah negeri. 3) sekolah swasta. Kemudian setelah memperoleh data selanjutnya adalah analisis data hasil wawancara tidak langsung melalui angket atau kuesioner tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan jenis pertanyaan kemudian mereduksi data. Hal ini dikarenakan pertanyaan tersebut dalam skala 1 sampai 4 berbagai variasi pilihan yang kemudian di kelompokkan sesuai jenisnya dan di tarik kesimpulan dalam bentuk mempresentasikan dan kesimpulan sederhana dari hasil tersebut.

### III. HASIL

Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai pengaruh status sekolah terhadap sistem kebijakan kepala sekolah dengan sasaran kepala sekolah jenjang sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) baik itu sekolah yang berstatus negeri maupun sekolah yang berstatus swasta dari berbagai sekolah di Sumedang di dapat data-data sebagai berikut:

#### 3.1 Data demografis responden

Hasil pengisian responden terhadap survei melalui wawancara tidak langsung menggunakan *google form* menunjukkan bahwa survei didominasi oleh kepala sekolah perempuan dengan persentase sebesar (80%) dan sisanya sebesar (20%) oleh kepala sekolah laki-laki. Adapun responden yang mengisi angket paling banyak dari sekolah dasar berstatus negeri yaitu sebesar (83,3%) sisanya terbagi dari sekolah berstatus swasta ataupun juga madrasah ibtidaiyah. Responden yang mengisi angket juga beragam rentang umurnya paling banyak di dominasi pada rentang umur 41-47 tahun yaitu sebesar (33,3%) dan pengalaman bekerja yang dominan pada rentang 16-20 tahun sebesar (23,3%). Untuk penyajian lebih rinci disajikan dalam bentuk tabel data demografis responden yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data demografis responden

Variabel	Kode	Distribusi
Jenis Kelamin	Laki-laki	6 (20%)
	Perempuan	24 (80%)
Jenis Sekolah	Sekolah Dasar	25 (83,3%)
	Madrasah Ibtidaiyah	5 (16,7%)
Status Sekolah	Negeri	25 (83,3%)
	Swasta	5 (16,7%)
Usia	30 - 35	7 (23,3%)
	36 - 41	5 (16,7%)
	42 - 47	10 (33,3%)
	48 - 53	8 (26,7%)
	> 53	0 (0%)
Pengalaman bekerja	1 - 5	5 (16,7%)
	6 - 10	6 (20%)
	11 - 15	6 (20%)
	16 - 20	7 (23,3%)
	> 20	6 (20%)

### 3.2 Data hasil penelitian status sekolah terhadap sistem kebijakan kepala sekolah

Berdasarkan hasil angket di dapat bahwa banyak responden yang setuju terhadap adanya pengaruh status sekolah dengan sistem kebijakan kepala sekolah walaupun masing-masing sekolah memiliki karakteristik masing-masing yang mana kepala sekolah hanya menjalankan dan menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan sekolah yang dipimpinnya. Pada hasil angket juga terlihat bahwa responden tersebut sudah mengetahui tugas yang diemban sebagai seorang kepala sekolah sebelum menetapkan suatu kebijakan.

Pada hasil angket ini terbagi menjadi 3 kelompok yang mana terkait dengan sistem kebijakan kepala sekolah, sekolah negeri, dan juga sekolah swasta. Pertanyaan atau pernyataan pada angket ini merujuk pada ketiga kelompok tersebut dan diperoleh rata-rata dari masing-masing kelompok pertanyaan ataupun pernyataan tersebut yaitu sebesar (10%) responden memilih sangat setuju ataupun sangat mengetahui terkait dengan sistem kebijakan kepala sekolah. Sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar (87,21%) responden memilih setuju atau mengetahui. Kemudian untuk responden yang memilih tidak setuju yaitu sebesar (2,78%) dan tidak ada responden yang memilih pertanyaan ataupun pernyataan sangat tidak setuju.

Selanjutnya pada kelompok pertanyaan ataupun pernyataan mengenai sekolah negeri diperoleh rata-rata dengan presentase yang sangat setuju atau sangat mengetahui yaitu sebesar (5,23%), yang memilih setuju atau mengetahui yaitu sebesar (81,9%) dan sisanya yang memilih tidak setuju yaitu sebesar (12,86%), maka tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Kemudian untuk kelompok pertanyaan ataupun pernyataan mengenai sekolah swasta diperoleh rata-rata dengan presentase yang sangat setuju atau sangat

mengetahui yaitu sebesar (6,68%), yang memilih setuju atau mengetahui yaitu sebesar (91,4%) dan sisanya yang memilih tidak setuju yaitu sebesar (2,87%), sehingga tidak ada juga responden yang memilih sangat tidak setuju.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hampir semua responden yang berpartisipasi mengisi angket dalam penelitian mengenai pengaruh status sekolah terhadap sistem kebijakan kepala sekolah relatif setuju ataupun mengetahui baik itu tugas pokok kepala sekolah, mengapa status sekolah juga ada pengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Nasution (2015) bahwa setiap kepemimpinan seorang pemimpin walaupun adanya karakteristik yang berbeda-beda, namun ada pengaruh unsur eksternal ataupun internal yang mempengaruhi dalam membuat keputusan terkait wewenang yang dipimpinya. Untuk penyajian lebih rinci disajikan dalam bentuk tabel data demografis responden yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil penelitian mengenai pengaruh status sekolah terhadap sistem kebijakan kepala sekolah

Hasil Penelitian	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sistem Kebijakan Kepala Sekolah	3	10	26,16	87,	0,83	2,7	0	0	30	100
Sekolah Negeri	1,57	5,2	24,58	81,	3,85		0	0	30	100
Sekolah Swasta	2		27,14		0,86	12,	0	0	30	100
		6,6		91,		86				
		8		4		2,8				
						7				

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian yang dikemas dalam bentuk *google form*. Instrument penelitian ini berupa kuesioner pertanyaan ataupun pertanyaan mengenai sistem kebijakan kepala sekolah, sekolah negeri dan sekolah swasta. Moleong (2002) mengatakan bahwa instrument sangat perlu ada dalam penelitian, dalam penelitian kualitatif bertujuan memudahkan untuk mereduksi data sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Maka dari itu, berikut adalah kuesioner penelitian mengenai pengaruh status sekolah terhadap kebijakan kepala sekolah:

Tabel 3. Kuesioner penelitian pengaruh status sekolah terhadap kebijakan kepala sekolah

NO	PERTANYAAN	4	3	2	1
1.	Kepala sekolah mengetahui pedoman peraturan kepala sekolah dan tugas pokok sebagai kepala sekolah				
2.	Kepala sekolah melakukan tugas manajerial, supervisi, administrasi dan juga kewirausahaan				
3.	Sebagai kepala sekolah mampu mewujudkan visi misi sekolah dan mengayomi warga sekolah				
4.	Sebagai seorang kepala sekolah mampu mewujudkan sekolah efektif				

5. Sebagai seorang kepala sekolah mampu mengembangkan kemampuan inovatif dan kreatif agar warga sekolah berprestasi dan mengharumkan sekolah
  6. Seorang kepala sekolah membuat kebijakan sesuai dengan peraturan kepala sekolah
  7. Sekolah yang berstatus negeri menganut pada pedoman dinas pendidikan
  8. Pada sekolah negeri aturan yang ditetapkan sangat ketat untuk siswa dan guru dapat berprestasi
  9. Baik sekolah dasar negeri maupun madrasah ibtidaiyah negeri sama-sama adanya mata pelajaran umum
  10. Bagi sekolah dasar negeri mengedapankan kerapian, ketaatan terhadap aturan sekolah, dan hukuman bagi yang melanggar
  11. Bagi sekolah dasar negeri yang di unggulkan adalah prestasi akademik maupun non akademik sedangkan bagi sekolah madrasah ibtidaiyah negeri mengunggulkan prestasi keagamaan baik akademiknya ataupun bukan
  12. Pembelajaran di sekolah negeri tersusun rapih dari RPP, Media pembelajaran, Penilaian yang memudahkan siswa dalam belajar
  13. Orang tua siswa mempercayai sekolah negeri karena adanya juga untuk mengasah bakat dan minat anak-anaknya di sekolah
  14. Seorang kepala sekolah swasta menganut pedoman bukan hanya pada dinas pendidikan namun juga pada ketua yayasan
  15. Pada sekolah swasta baik sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah mengedepankan biaya untuk menunjang fasilitas belajar peserta didik
  16. Pada sekolah swasta dituntut dengan pembelajaran yang tersusun rapih dari RPP, Media pembelajaran, Penilaian yang memudahkan siswa belajar
  17. Pada sekolah swasta fasilitas belajar sangat mendukung dan lengkap untuk kebutuhan siswa belajar
  18. Pada sekolah swasta sering dianggap sebelah mata oleh orang tua siswa daripada sekolah negeri
  19. Pada sekolah swasta cenderung menjadi alternatif pilihan siswa terakhir setelah tidak diterima di sekolah negeri
  20. Pada sekolah swasta harus mampu menunjukkan beragam prestasi untuk menarik murid bersekolah di sekolah tersebut
- 

Dengan adanya 4 alternatif tersebut yaitu dengan keterangan seperti berikut:

4 = Sangat Setuju / Sangat Mengetahui

3 = Setuju / Mengetahui



2 = Tidak Setuju / Sangat Tidak Mengetahui

1 = Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Mengetahui

## IV. PEMBAHASAN

### 4.1 Sistem kebijakan kepala sekolah

Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai sistem kebijakan kepala sekolah dengan sasaran kepada kepala sekolah jenjang sekolah dasar (SD) ataupun jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) di Sumedang didapatkan bahwa lebih dari setengah responden yaitu lebih memilih setuju atau mengetahui dan sangat setuju atau sangat mengetahui daripada tidak setuju atau sangat tidak setuju ataupun tidak mengetahui atau sangat tidak mengetahui terkait dengan sistem kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang mana dalam angket tersebut bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana kepala sekolah membuat dan memutuskan sistem kebijakan untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya serta pengimplementasiannya.

Berdasarkan hasil angket didapat bahwa yang setuju atau mengetahui terhadap pernyataan bahwa kepala sekolah mengetahui pedoman peraturan kepala sekolah dan tugas pokok sebagai kepala sekolah yaitu sebesar (83,3%) dan yang memilih sangat setuju atau sangat mengetahui yaitu sebesar (16,7%). Kemudian yang setuju atau mengetahui terhadap pernyataan bahwa kepala sekolah melakukan tugas manajerial, supervisi, administrasi dan juga kewirausahaan yaitu sebesar (86,7%) sedangkan yang memilih sangat setuju atau sangat mengetahui yaitu sebesar (13,3%). Selanjutnya yaitu terhadap pernyataan bahwa sebagai kepala sekolah mampu mewujudkan visi misi sekolah dan mengayomi warga sekolah di dapat yang memilih setuju atau mengetahui sebesar (93,3%) dan yang memilih sangat setuju atau sangat mengetahui sebesar (6,7%). Banyak yang memilih setuju atau mengetahui terhadap pernyataan bahwa sebagai seorang kepala sekolah mampu mewujudkan sekolah efektif yang mana sebesar (96,7%) dan yang memilih sangat setuju atau sangat mengetahui sebesar (3,3%). Dari hal tersebut tersebut dapat dikatakan bahwa semua responden yang mengisi angket setuju dan sangat setuju ataupun mengetahui atau sangat mengetahui terhadap sistem kebijakan yang harus dilakukan seorang kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah yang unggul.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Amin (2021) bahwa sebagian besar seorang kepala sekolah sudah mengetahui dan mengimplementasikan dengan baik tugas pokoknya sebagai seorang pemimpin. Pratiwi & Afriansyah (2020) mengatakan bahwa kebijakan

sekolah akan terimplementasi dengan baik jika pemimpinnya mampu menguasai dan mengimplementasikan dengan baik tugasnya. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin harus adanya unsur-unsur kepemimpinan dalam dirinya yaitu (1) pemimpin adalah orang yang mengarahkan pengikut, (2) pengikut adalah orang yang bekerja di bawah pengaruh pimpinan, (3) konteks adalah situasi yang formal atau non formal, sosial atau kerja, dinamis atau statis, darurat atau rutin, rumit atau sederhana sesuai hubungan pimpinan dengan pengikut, (4) proses merupakan tindakan kepemimpinan, perpaduan memimpin, mengikuti, bimbingan menuju pencapaian tujuan, pertukaran, membangun hubungan, (5) hasil merupakan yang muncul dari hubungan pemimpin, pengikut dan situasi rasa hormat, kepuasan dan kualitas produk (Nasution, 2015).

Walaupun demikian, pada pernyataan bahwa sebagai seorang kepala sekolah mampu mengembangkan kemampuan inovatif dan kreatif agar warga sekolah berprestasi dan mengharumkan sekolah, yang memilih setuju atau mengetahui sebesar (80%), yang memilih sangat setuju atau sangat mengetahui yaitu sebesar (10%), dan yang memilih tidak setuju atau tidak mengetahui yaitu sebesar (10%) sedangkan untuk yang memilih sangat tidak setuju atau sangat tidak mengetahui tidak ada yang memilih. Kemudian pada pernyataan bahwa seorang kepala sekolah membuat kebijakan sesuai dengan peraturan kepala sekolah yang memilih setuju atau mengetahui yaitu sebesar (83,3%), yang memilih sangat setuju atau sangat mengetahui sebesar (10%) dan yang memilih tidak setuju atau sangat tidak mengetahui sebesar (6,7%) dan tidak ada yang memilih sangat tidak setuju atau sangat tidak mengetahui. Berdasarkan hasil angket tersebut mayoritas responden yang mengisi lebih setuju dan sangat setuju berdasarkan pernyataan mengenai sistem kebijakan seorang kepala sekolah, walaupun masih ada sedikit orang memilih tidak setuju. Maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin akan terwujud apabila seseorang pemimpin memperlakukan orang lain atau bawahannya dengan baik dan memberikan motivasi agar mereka menunjukkan *performance* yang tinggi dalam melaksanakan tugas (Isnaini, 2019).

#### **4.2 Sekolah negeri**

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekolah negeri dengan sasaran kepada kepala sekolah jenjang sekolah dasar (SD) ataupun jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) di Sumedang didapatkan bahwa lebih dari setengah responden yaitu lebih memilih setuju atau mengetahui dan sangat setuju atau sangat mengetahui daripada tidak setuju atau sangat tidak setuju ataupun tidak mengetahui atau sangat tidak mengetahui terkait dengan yang berhubungan

dengan bagaimana pengimplementasian kebijakan kepala sekolah di sekolahnya yang berstatus sebagai sekolah negeri.

Berdasarkan hasil angket didapat bahwa yang setuju atau mengetahui terhadap pernyataan bahwa sekolah yang berstatus negeri menganut pada pedoman dinas pendidikan yaitu sebesar (90%) dan (10%) sangat setuju ataupun sangat mengetahui. Kemudian yang memilih setuju atau mengetahui bahwa pada sekolah negeri aturan yang ditetapkan sangat ketat untuk siswa dan guru dapat berprestasi yaitu sebesar (80%) dan (10%) memilih pada sangat setuju atau sangat mengetahui serta (10%) lagi memilih tidak setuju atau tidak mengetahui. Selanjutnya responden lebih banyak memilih setuju atau mengetahui daripada tidak setuju atau tidak mengetahui terkait pernyataan bahwa baik sekolah dasar negeri maupun madrasah ibtidaiyah negeri sama-sama adanya mata pelajaran umum yaitu yang memilih setuju atau mengetahui yaitu sebesar (83,3%) dan yang memilih tidak setuju atau tidak mengetahui sebesar (16,7%).

Pada hal ini menunjukkan bahwa hampir semua responden menyetujui terhadap pertanyaan ataupun pernyataan terkait sekolah negeri. Namun pada dasarnya setiap kepala sekolah memiliki strategi atau cara tersendiri dalam memimpin anggotanya. Sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki karakteristik mereka sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing akan menampilkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Sejalan dengan penelitian Nurdin & Usman (2013) bahwa status sekolah hanyalah sebagai dasar acuan tetapi peran kepala sekolah yang sangat penting untuk memajukan sekolah. Sama halnya dengan sekolah biasa dengan sekolah berbasis Islam keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki tujuan yang sama seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara dan karakteristik masing-masing, sekolah negeri dan sekolah swasta tentu telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut (MPR, 2019).

Kemudian yang terdapat pada pernyataan bahwa bagi sekolah dasar negeri mengedapankan kerapihan, ketaatan terhadap aturan sekolah, dan hukuman bagi yang melanggar juga lebih banyak responden mengisi setuju atau mengetahui yaitu sebesar (76,7%), sangat setuju atau sangat mengetahui sebesar (3,3%) dan tidak setuju atau tidak mengetahui sebesar (20%). Lalu pada pernyataan bahwa bagi sekolah dasar negeri yang di unggulkan adalah prestasi akademik maupun non akademik sedangkan bagi sekolah madrasah ibtidaiyah negeri mengunggulkan prestasi keagamaan baik akademiknya ataupun bukan responden setuju atau mengetahui yaitu sebesar (73,3%), sangat setuju atau sangat mengetahui sebesar (6,7%) dan tidak setuju atau sangat tidak mengetahui sebesar (20%).

Kemudian pada pernyataan bahwa pembelajaran di sekolah negeri tersusun rapih dari RPP, media pembelajaran, penilaian yang memudahkan siswa dalam belajar sebesar (86,7%) responden setuju atau mengetahui, (3,3%) responden sangat setuju atau sangat mengetahui, dan (10%) responden tidak setuju atau tidak mengetahui. Begitu juga dengan pernyataan bahwa orang tua siswa mempercayai sekolah negeri karena adanya juga untuk mengasah bakat dan minat anak-anaknya di sekolah yang memilih setuju atau mengetahui sebesar (83,3%), sangat setuju atau sangat mengetahui sebesar (3,3%) dan tidak setuju atau tidak mengetahui sebesar (13,3%).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa banyak nya responden yang mengisi memiliki anggapan yang sama dan sudah mengetahui bahwa faktanya sekolah negeri lebih menjadi favorit siswa walaupun sistem kepemimpinan seorang kepala sekolah memiliki karakteristik berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurdin & Usman (2013) bahwa status sekolah hanyalah sebagai dasar acuan tetapi peran kepala sekolah yang sangat penting untuk memajukan sekolah. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memiliki berbagai dimensi yang satu sama lain berkaitan dan saling menunjang yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar untuk peningkatan kualitas dan pengembangan potensi siswa. Menurut Priansa & Junidan (2014) kepala sekolah merupakan pejabat profesional yang ada dalam organisasi sekolah, yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya sekolah dan bekerja sama dengan guru-guru, staff dan pegawai lainnya dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sejalan Supriadi dkk. (2022) mengatakan kepala sekolah yang profesional ia akan melakukan penyesuaian kebutuhan dunia pendidikan dan mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi. Menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin sebuah lembaga pendidikan seperti kepala sekolah tidaklah semata-mata memegang jabatan tertinggi saja, akan tetapi dibebani beberapa tanggung jawab yang luar biasa, sehingga kepala sekolah haruslah cukup akan ilmu baik ilmu kependidikan maupun ilmu kepemimpinan.

#### **4.3 Sekolah swasta**

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekolah swasta dengan sasaran kepada kepala sekolah jenjang sekolah dasar (SD) ataupun jenjang madrasah ibtidaiyah (MI) di Sumedang didapatkan bahwa lebih dari setengah responden yaitu lebih memilih setuju atau mengetahui dan sangat setuju atau sangat mengetahui daripada tidak setuju atau sangat tidak setuju ataupun tidak mengetahui atau sangat tidak mengetahui terkait dengan yang berhubungan

dengan bagaimana pengimplementasian kebijakan kepala sekolah di sekolahnya yang berstatus sebagai sekolah swasta.

Berdasarkan hasil angket didapat bahwa yang setuju atau mengetahui terhadap pernyataan bahwa seorang kepala sekolah swasta menganut pedoman bukan hanya pada dinas pendidikan namun juga pada ketua yayasan yaitu sebesar (93,3%) dan sangat setuju atau sangat mengetahui yaitu sebesar (6,7%). Selanjutnya pada pernyataan bahwa pada sekolah swasta baik sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah mengedepankan biaya untuk menunjang fasilitas belajar peserta didik sebesar (93,3%) guru memilih setuju atau mengetahui dan sangat setuju atau sangat mengetahui sebesar (6,7%). Kemudian pada pernyataan bahwa pada sekolah swasta dituntut dengan pembelajaran yang tersusun rapih dari RPP, media pembelajaran, penilaian yang memudahkan siswa belajar sebesar (86,7%) setuju atau mengetahui, (10%) sangat setuju atau sangat mengetahui dan (6,7%) tidak setuju atau tidak mengetahui. Pada pernyataan bahwa pada sekolah swasta fasilitas belajar sangat mendukung dan lengkap untuk kebutuhan siswa belajar sebesar (86,7%) siswa setuju atau mengetahui, (10%) sangat setuju atau sangat mengetahui dan (6,7%) tidak setuju atau tidak mengetahui. Selanjutnya responden banyak memilih setuju atau mengetahui pada pernyataan bahwa pada sekolah swasta sering dianggap sebelah mata oleh orang tua siswa daripada sekolah negeri yaitu sebesar (93,3%) dan tidak setuju atau tidak mengetahui sebesar (6,7%). Lalu pada pernyataan bahwa pada sekolah swasta cenderung menjadi alternatif pilihan siswa terakhir setelah tidak diterima di sekolah negeri sebesar (93,3%) siswa setuju atau mengetahui dan sisanya memilih sangat setuju atau sangat mengetahui yaitu sebesar (6,75). Serta pada pernyataan bahwa pada sekolah swasta harus mampu menunjukkan beragam prestasi untuk menarik murid bersekolah di sekolah tersebut sebesar (93,3%) siswa setuju dan sisanya memilih sangat setuju atau sangat tidak mengetahui yaitu sebesar (6,75).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dari hasil responden yang telah mengisi mengenai pandangan terhadap sekolah swasta, hampir semua responden cenderung mengetahui bahwa sekolah swasta banyak yang dipandang oleh orang tua murid. Hal ini membuktikan walaupun karakteristik pemimpin berbeda-beda terhadap membuat kebijakan untuk sekolahnya yang mana mengacu pada tugas nya sebagai seorang kepala sekolah, namun ada yang membedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Hal ini sejalan pada penelitian Sari (2019) bahwa status sekolah swasta berpengaruh tergantung pada bagaimana pemimpin tersebut menciptakan suatu perubahan. Yang mana tugas seorang pemimpin pendidikan harus mampu menggerakkan pelaksanaan dan tujuan pendidikan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Seorang yang menduduki profesi pemimpin pendidikan

menurut Khamdani (2014) dalam menjalankan tugas profesi pemimpin pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor legal sebagai pengaruh dalam kepemimpinan, akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktural. Faktor kondisi ekonomi dan konsep-konsep pendidikan sebagai pengaruh dalam kepemimpinan, kondisi sosial ekonomi juga konsep tujuan pendidikan menjadi dua macam dari faktor kondisi tersebut. Faktor hakikat dan ciri sekolah sebagai pengaruh kepemimpinan. Faktor kepribadian pemimpin pendidikan dan latihan-latihan sebagai faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan (*leadership development*) dari eksistensinya diartikan sebagai perpanjangan kapasitas seseorang untuk menjalankan manajemen agar tercapai sesuatu menjadi efektif dalam peran dan proses kepemimpinan (Syadzili, 2018). Maka dari itulah kepemimpinan kepala sekolah juga dikatakan sebagai tugas penting untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya (Cahyono, 2022).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa peran sebagai seorang pemimpin pendidikanlah yang sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya sekolah yang dipimpinnya. Baik sekolah yang berstatus negeri ataupun swasta pada dasarnya kebijakan yang diberikan seorang pemimpinlah yang berpengaruh terhadap kualitas sekolahnya. Dengan demikian walaupun adanya pengaruh status terhadap sistem kebijakan kepala sekolah. Namun bagaimana cara kepala sekolah sebagai pemimpin lah yang penting untuk mewujudkan kualitas unggul sekolahnya yang dibuktikan dengan banyaknya prestasi warga sekolah dan kepercayaan masyarakat.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini adanya pengaruh status sekolah terhadap sistem kebijakan yang dilakukan kepala sekolah. Namun pada dasarnya setiap sekolah memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing, begitu juga pada diri seorang pemimpin yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin tersebut membuktikan dan melakukan perubahan dengan kreatif dan inovasi dalam membuat kebijakan untuk membawa sekolahnya lebih maju dengan membuat status sekolah tersebut itu lebih baik dan dipandang serta dipercaya masyarakat dengan adanya prestasi dari sekolah yang dipimpinnya oleh warga sekolahnya.

## Acknowledgement

Terima kasihku teruntuk: Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi PGSD Kampus Sumedang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asep Suryana & Dedy Achmad Kurniady. (2018). *Administrasi Pendidikan Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Cahyono, E. T. (2022). Kepemimpinan Efektif Bagi Generasi Milenial. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 641. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6269>
- Hadari Nawawi, dan Martini Hadari. (2012). *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, Nuzuwar, & Nurmal, I. (2019). Peran Kepala Sekolah sebagai Administrator dan Supervisor. *Administratioon and Educational Management*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.31539/alignment.v2i1.743>
- Hartini, U., Husna, U., & Masluyah. (2017). Pengaruh Kepala Sekolah Sebagai Leader Dan Pemberian Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Guru SD. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 6(12).
- Isnaini, M. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Seorang Supervisor dalam Pengawasan Kinerja Guru di Sekolah Dasar. *El-Tsaqafah Jurnal Jurusan PBA*, 18(2), 215–288.
- Khamdani, P. (2014). Jurnal Madaniyah Edisi VII Agustus 2014 ISSN 2086-3462. *Madaniyah Edisi VII, VIII(2)*, 259–276.
- Kurnia Sari, M. (2019). *Kepemimpinan Pendidikan*. 1–3.
- Moleong. (2002). *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- MPR. (2019). *Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)*. Jakarta: Efullama.
- Nasution, W. N. (2015). Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Tarbiyah*, 22(1), 66–86. <https://doi.org/10.30829/tar.v22i1.6>
- Nur Amin, S. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu Sumber Daya Pendidik Di Sekolah. *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 76–86. <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2058>
- Nurdin, M., & Usman, H. (2013). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Taliwan Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 1(2), 203–218. <https://doi.org/10.21831/amp.v1i2.2395>
- Pratiwi, D., & Afriansyah, H. (2020). *Kepemimpinan Pendidikan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rck3d>
- Priansa & Doni Junidan. (2014). *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta.

- Rusydi Syadzili, M. F. (2018). Model Kepemimpinan Dan Pengembangan Potensi Pemimpin Pendidikan Islam. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 4(2).  
<https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i2.61>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Tindakan Kelas) (3 ed.)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhardiman B. (2012). *Studi Pengembangan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, H. M., Sauri, S., & Soro, S. H. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 dan SMPN 33 Kota Bandung. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 705–713.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.455>
- Tutin Aryanti, V. A., D. S. (2020). *Penelitian Kualitatif: Konsep Dasar dan Isu Metodologis*. Bandung: UPI PRESS.
- Wahjo Sumidjo. (2002). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya (III)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.